

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terdapat kesepakatan yang dikenal sebagai SDGs (*Sustainable Development Goals*) berlangsung dari tahun 2015 hingga 2030 untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. UU No. 52 tahun 2009 memberikan gambaran bahwa kependudukan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan PP No. 87 tahun 2014 menekankan pendidikan kependudukan untuk pembangunan. Sehingga pembangunan lebih menekankan pada peningkatan kualitas SDM dibandingkan dengan pembangunan fisik semata-mata (BKKBN, 2022).

Populasi penduduk Indonesia menurut data yang dikumpulkan BPS tahun 2024, sebanyak 281.603,8 jiwa. Dalam populasi tersebut, terdapat 142.188,6 jiwa penduduk laki-laki dan 139.415,2 jiwa perempuan. Terjadi perubahan jumlah dibandingkan 2020, perempuan Indonesia yang lebih banyak dibandingkan laki-laki. Sehingga dengan komposisi penduduk tersebut, untuk mendukung pembangunan di Indonesia maka diperlukan partisipasi masyarakat yang maksimal (Khoiruumah et al., 2024).

Salah satu cara strategis meningkatkan kesadaran masyarakat tentang persoalan kependudukan untuk memperbaiki kualitas hidupnya yakni dengan pendidikan kependudukan (Sitorus & Hutasoit, 2021). Konsep pendidikan kependudukan muncul sebagai inovasi pendidikan dalam permasalahan kependudukan untuk membantu negara mencapai tujuan stabilisasi populasi dan pembangunan bangsa (Pandey, 2005; Tiwari, 2021). Siswa yang menjadi bagian masyarakat sangat penting tersentuh dalam inovasi pendidikan kependudukan.

Peranan pendidikan kependudukan dalam pengajaran tentang konsep dan alasan peningkatan jumlah penduduk, dampak pertumbuhan penduduk terhadap lingkungan yang menyebabkan bencana, masalah kesehatan serta

pemberdayaan perempuan dan kesehatan reproduksi (Hazarika & Bora , 2022; Kapur, 2018). Program SSK dibentuk untuk mencegah masalah yang ada dalam kehidupan, sehingga menjadi solusi untuk mencegah masalah sosial yang disebabkan oleh kependudukan yang terus-menerus terjadi di masyarakat (Kamara et al., 2023).

Program SSK merupakan salah satu gagasan pendidikan kependudukan yang dilaksanakan pada jalur pendidikan formal. Program ini dilakukan untuk mengintegrasikan materi pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) ke dalam kurikulum dan kearifan lokal yang berlaku (BKKBN, 2017). SSK diharapkan dapat memberikan petunjuk dan panduan bagi penanggung jawab dan pengelola pendidikan, termasuk guru, dalam melaksanakan pendidikan kependudukan, keluarga berencana, dan pemberdayaan keluarga (Saifa & Supardi, 2023). Dalam alur terselenggaranya program SSK, keterlibatan unsur stakeholder, kepala sekolah, guru dan siswa dibutuhkan dalam pembentukan sikap dan perilaku terhadap masalah kependudukan (BKKBN, 2017).

Partisipasi siswa sangat penting karena tanpa adanya partisipasi siswa di sekolah tersebut maka program tidak akan berjalan dengan baik (Ulfa et al., 2023). Menurut Hasibuan dan Moedjiono (2006) dalam (Widiyaningrum et al., 2015) partisipasi siswa yakni sebagai keterlibatan siswa dalam kegiatan yang ditunjukkan dengan perilaku fisik dan psikis. Perilaku aktif siswa juga ditunjukkan dengan pernyataan mereka tentang apa yang ingin mereka lakukan dan telah mereka lakukan. Wujud partisipasi yang diberikan baik dalam bentuk finansial, kekuatan fisik, sumbangan material, dan sumbangan moril tentunya bertujuan untuk di kemajuan serta terlaksananya program (Fitriani, 2017). Susanti dalam penelitiannya menyatakan bentuk partisipasi siswa pada suatu program di sekolah meliputi kegiatan pembelajaran (kokurikuler), intrakurikuler, pembiasaan, ekstrakurikuler dan sosialisasi (Susanti, 2021).

Dari hal tersebut menunjukkan bahwa suatu program akan

mendatangkan prestasi untuk sekolah jika siswa berpartisipasi aktif dan peran yang maksimal dari pihak sekolah (Zulfirman & Sriyanto, 2019). Sehingga dari hal ini menjadi salah satu alasan awal peneliti untuk meneliti partisipasi siswa. Tidak ada program yang berhasil tanpa adanya dukungan. Dalam hal ini program SSK, program pendidikan kependudukan yang dianggap oleh sekolah sebagai suatu program yang terbaik tentu membutuhkan keterlibatan dari siswa (Sudrajat & Mujadidi, 2023).

Telah banyak penelitian sebelumnya yang membahas implementasi program SSK di sekolah diantaranya di SMP Negeri 2 Pakem, SMP Negeri 55 Surabaya, SMP Negeri 4 Amuntai, SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan, SMA Negeri 1 Lhoknga Aceh Besar dan sekolah lainnya (Fathin, 2022; Saifa & Supardi, 2023; Bratajaya, 2023; Lyedya et al., 2022; Aini, 2022; Kamara et al., 2023). Penelitian-penelitian tersebut memaparkan proses penyelenggaraan program SSK yang diupayakan keterlibatan dari unsur kepala sekolah dan guru. Namun sebagian besar kurang mengkaji lebih dalam keterlibatan siswa dari kegiatan-kegiatan dalam program SSK. Pendidikan kependudukan dapat dikatakan berhasil tidak hanya dengan sarana yang tersedia, tetapi juga karena keterlibatan aktif siswa sebagai subjek pembelajaran.

Kemudian sangat disayangkan sekolah-sekolah di DKI Jakarta masih minim menerapkan program SSK. Ini terbukti hingga sampai saat ini hanya SMPN 277 Jakarta yang menyandang paripurna tingkat nasional dalam regional 2. Hal tersebut diperoleh karena konsisten menerapkan SSK sejak tahun 2022. Keputusan Kepala BKKBN Tahun 2002 menetapkan sekolah ini untuk menyelenggarakan pendidikan kependudukan melalui program SSK, guna mengedukasi generasi muda mengenai permasalahan kependudukan. Serta berperan dan berperilaku sesuai dengan wawasan kependudukan.

Mengingat sejauh ini permasalahan kependudukan di Kota Jakarta Utara yaitu dalam kondisi prevalensi 18,5% anak stunting menjadikannya peringkat kedua tertinggi di DKI Jakarta pada tahun 2022 (KEMENKES, 2022). Pemerintah bekerjasama guna mempercepat menangani penurunan stunting di Jakarta Utara melalui pendekatan multi sektor (Revinel et al.,

2023).

Melihat tingginya angka tersebut diperlukan solusi untuk mengatasi berupa pencegahan untuk generasi selanjutnya yaitu dengan melalui program Sekolah Siaga Kependudukan di sekolah sebagai wujud pendidikan kependudukan. Selain oleh karenanya, program ini menjadi sarana penting untuk mencegah pernikahan dini dan peduli kesehatan penduduk guna penurunan stunting di masa depan. Pada 2 Mei 2023, SMP Negeri 277 Jakarta berkomitmen menjalankan program SSK sehingga di bulan kelima pada tahun pertama program SSK, sekolah ini telah berhasil mendapatkan penghargaan paripurna.

Adapun penghargaan dari pelaksanaan program SSK sebagai suatu bentuk pencapaian yang diperoleh dari komitmen SMP Negeri 277 Jakarta dalam penyelenggaran program SSK yang mendapat dukungan penuh warga sekolah. Predikat tersebut hanya menunjukkan bukti bahwa pihak sekolah dan guru yang terlihat berpartisipasi penuh dalam melengkapi administrasi program, sarana prasarana melalui fasilitas pojok kependudukan, dan pembelajaran melalui mata pelajaran serta kegiatan yang terintegrasi (BKKBN, 2019). Pencapaian selanjutnya tidak hanya ditentukan dari pihak sekolah dan guru, melainkan juga bergantung pada partisipasi siswa. Belum adanya data empiris yang menggambarkan partisipasi siswa menjadikan sekolah belum memiliki dasar mengenai sejauh mana program dipahami, diikuti dan dimanfaatkan oleh siswa.

Siswa SMP Negeri 277 Jakarta yang menjadi salah satu target dalam program ini pada kenyataannya perlu mendapat perhatian khusus terhadap siswa dalam berpartisipasi secara maksimal untuk mencapai tujuan program. Banyaknya program sekolah yang diikuti oleh sekolah ini menjadikan program SSK cukup disisihkan. Sehingga dikhawatirkan berimbang untuk keberlanjutan program ini di tahun berikutnya.

Sering kali partisipasi seseorang dalam sebuah program tidak utuh keterlibatannya. Siswa yang berpartisipasi dalam program di sekolah tentunya memiliki tingkat yang berbeda-beda di tiap sekolah karena sesuai dengan

kondisi siswa, peran sekolah dan guru dalam melibatkan siswa di sekolah (Arrahmah, 2018). Kemudian dalam praktiknya, partisipasi dalam berbagai kegiatan seringkali sangat terbatas atau tidak merata (Cohen & Uphoff, 1980). Menurut Cohen & Uphoff (1980) terdapat empat tahap partisipasi yang harus diperhatikan dalam berpartisipasi terhadap suatu program pembangunan yaitu partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemanfaatan dan partisipasi dalam evaluasi. Namun ternyata partisipasi tidak seluruhnya dilaksanakan secara maksimal dalam sebuah program (Sabilla & Purnaningsih, 2020).

Tinjauan dalam riset terdahulu, partisipasi siswa dalam pojok kependudukan diperlukan untuk pengelolaannya (Lyedya et al., 2022). Namun kenyataanya, pojok kependudukan kurang cukup diperhatikan dalam penataannya sehingga banyak barang yang menumpuk, berdebu dan rusak (Sudrajat & Mujadidi, 2023). Kemudian siswa kurang memahami program SSK dikarenakan kurangnya sosialisasi maupun penyuluhan (Lyedya et al., 2022). Ulfah (2021) dalam penelitiannya menemukan hambatan pelaksanaan SSK saat integrasi mapel di kelas yakni siswa menganggap luasnya materi kependudukan dan banyak hafalan serta siswa tidak banyak bertanya, diam dan hanya mendengarkan (Ulfah, 2021). Adapun siswa kurang tertarik menggunakan layanan konseling (PIK-R) di sekolah dan minimnya minat terhadap materi kependudukan karena masih awam tentang pojok kependudukan (Zahra, 2024).

Kemudian mengingat belum adanya posyandu remaja di Kota Jakarta Utara menjadikan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja menjadi terbatas (Agung et al., 2022). Adanya program SSK mampu memberi dampak pada pembangunan SDM sebagai outputnya memberikan pemahaman kesehatan reproduksi, pendewasaan usia perkawinan dan mempengaruhi perencanaan masa depan (Awwaluddin & Sadewo, 2021). Pentingnya partisipasi siswa dalam pelaksanaan pendidikan kependudukan dalam program SSK juga diungkapkan oleh Sya'ballinda (2024) terdapat pernyataan dalam laporannya mengenai sejauh mana program SSK menyatakan bahwa partisipasi aktif

siswa dalam belajar masalah kependudukan sangat diperlukan (Sya'ballinda, 2024). Studi terdahulu yang dilakukan Lyedya et al, Sudrajat & Mujadidi, Ulfah dan Sya'ballinda tersebut kurang menggali kajian partisipasi siswa lebih dalam. Beberapa masalah partisipasi siswa dari penelitian terdahulu tersebut menjadi gap peneliti untuk mengkaji lebih dalam pada partisipasi dari unsur siswa.

Berdasarkan kondisi dari penelitian terdahulu, masalah utama yang muncul adalah seberapa aktif siswa dilibatkan dan terlibat dalam program SSK. Karena siswa sebagai kelompok sasaran remaja dan juga subjek yang secara langsung akan memberi pengetahuan dasar yang mendalam terkait Bangga Kencana. Selain itu, partisipasi siswa dalam program ini memungkinkan siswa lebih peduli kondisi dinamika kependudukan di sekitar dan permasalahannya. Oleh karena itu, partisipasi siswa yang rendah atau terbatas dapat dianggap sebagai hal utama yang mencerminkan seberapa besar kebutuhan siswa terhadap manfaat yang ditawarkan program. Selain itu juga menjadi alasan mengapa penting untuk meneliti partisipasi siswa secara lebih mendalam dalam penelitian ini.

Siswa bisa saja diberi kesempatan inisiatif terlibat seluruh bagian partisipasi dalam program yang direncanakan sekolah atas jaminan bahwa pendapat siswa diakui dan dimasukkan ke dalam rencana kegiatan dalam program sekolah (Hermansyah, 2024). Perilaku remaja atau siswa dapat dilihat dari kesadaran mereka akan pentingnya program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), peduli pada setiap kegiatan terkait program dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan terkait program (Kamara et al., 2023).

Sehingga dari berbagai permasalahan tersebut menjadi kesempatan lebih peneliti untuk menganalisis partisipasi siswa dalam program SSK. Dari adanya penelitian ini diharapkan sebagai sumbangsih pemikiran dan referensi untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam program SSK di sekolah serta masukan untuk DPPAPP dan BKKBN dalam membangun pendidikan kependudukan melalui jalur formal.

Sehingga penelitian mengenai partisipasi penting untuk dilakukan

dengan menganalisis partisipasi siswa dalam program SSK yang selama ini dijalankan dalam satu periode. Apakah siswa berpartisipasi maksimal dalam prosesnya dengan adanya predikat paripurna sebagai penghargaan yang disandang dalam program SSK. Dari uraian yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik meneliti dengan judul: Partisipasi Siswa Dalam Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Di SMP Negeri 277 Jakarta.

B. Identifikasi Masalah

Masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, yaitu:

1. Bagaimana partisipasi siswa dalam program SSK di SMP Negeri 277 Jakarta?
2. Seberapa besar partisipasi siswa dalam program SSK di SMP Negeri 277 Jakarta?

C. Pembatasan Masalah

Partisipasi siswa sangat berkaitan dengan adanya pelaksanaan suatu program. Oleh karena itu, penulis membatasi penelitian hanya pada:

1. Penelitian ini difokuskan hanya meneliti partisipasi dari unsur siswa tahun ajaran 2024/2025.
2. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik statistik deskriptif. Tidak menguji hubungan, pengaruh maupun membandingkan.
3. Partisipasi yang diteliti hanya partisipasi yang diukur melalui instrumen angket. Tidak mencakup sikap tersembunyi atau motivasi psikologis yang mendalam.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Tingkat Partisipasi Siswa Dalam Program Sekolah Siaga Kependudukan di SMP Negeri 277 Jakarta?”

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi siswa dalam program SSK di SMP Negeri 277 Jakarta. Adapun kegunaan yang diharapkan peneliti melalui penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini memberikan referensi ilmiah untuk masalah dalam bidang keilmuan, terutama dalam teori partisipasi yang digunakan dalam penelitian pendidikan. Sekurang-kurangnya, penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan kajian baru tentang partisipasi siswa dalam Program Sekolah Siaga Kependudukan.
2. Bagi instansi terkait, sebagai salah satu bahan evaluasi Program Sekolah Siaga Kependudukan. Dan keberlanjutan kebijakan peningkatan wawasan kependudukan dan keluarga berencana kepada siswa yang merupakan bagian dari masyarakat.
3. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk program pemerintah yang menangani permasalahan kependudukan, khususnya melalui peningkatan kualitas penduduk dengan pendidikan kependudukan.
4. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan pengalaman baru, peningkatan pengetahuan dan membuka wawasan tentang partisipasi dan Program Sekolah Siaga Kependudukan. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk masalah serupa.